

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG

Untuk Periode Tahunan
Tanggal 31 Desember 2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standart Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Brondong, Januari 2023

Kepala



Ibrahim, A.Pi, M.Si

NIP. 19740313 199803 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	4
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	5
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	51
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	58
F. Pengungkapan Penting Lainnya	61
VI. Lampiran dan Daftar	62

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG

Jl. RAYA BRONDONG NO. 17, BRONDONG - LAMONGAN

TELEPON (0322) 663105, FAXIMILE : (0322) 663105

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Brondong, Januari 2023

Kepala,

Ibrahim, A.Pt. M.Si

NIP. 19740313 199803 1 003



Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Semester II Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.672.654.519,- atau mencapai 223 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 1,200,001,000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 13,731,967,724,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13,847,901,000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada TAHUNAN yang berakhir tgl 31 Desember 2022 .

Nilai Aset Tahunan per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 224,593,608,463,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 367,418,689,-; Aset Tetap (netto) sebesar Rp. 223,088,892,697,-; Piutang Bukan Pajak (netto) sebesar Rp.3,120,233; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp.1,137,297,077,- kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 147,383,038,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 224,593,608,463,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode TAHUNAN yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 2,564,403,501,- sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp. 0,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (13.936,892,698,) Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp92,091,355, Surplus /(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0,- Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 583.500,- dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,- dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(14,108,246,433,-)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas TAHUNAN yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 230,684,745,854,- Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (14,108,246,433,-) Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan dan Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar, masing-masing sebesar Rp.(0,-) dan Rp. (0,-) kemudian ditambah dengan selisih Revaluasi set Tetap senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 11.059.313.205,- sehingga kenaikan/penurunan Ekuitas sebesar Rp.(2,868,933,228,-) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Ekuitas Akhir adalah senilai Rp. 227,828,812,626,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TAHUNAN Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.200.001.000	2.003.906.071	166,99	1.045.530.637
JUMLAH PENDAPATAN		1.200.001.000	2.003.906.071	166,99	1.045.530.637
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	6.850.461.000	4.912.921.850	71,72	4.582.341.011
Belanja Barang	B.4	5.988.105.000	3.984.847.094	66,55	3.208.713.017
Belanja Modal	B.5	1.115.973.000	912.448.150	81,76	1.253.175.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		13.954.539.000	9.810.217.094	70,30	9.044.229.028

II. NERACA

**KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
NERACA TAHUNAN PER 31 Desember 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	119,500,000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	1,544,000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	3,120,223	583,500
Piutang Bukan Pajak (netto)	C.5	3,107,224	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	(12,999)	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	326,204,065	325,924,050
Persediaan	C.10	36,563,400	2,230,000
Jumlah Aset Lancar		367,418,689	448,237,550
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	173,666,734,550	173,666,734,550
Peralatan dan Mesin	C.15	32,570,884,054	33,770,392,055
Gedung dan Bangunan	C.16	36,034,540,995	35,514,794,924
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.17	47,837,126,895	47,713,229,895
Aset Tetap Lainnya	C.18	96,182,000	96,182,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(67,116,575,797)	(61,584,901,374)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.21	-	-
Jumlah Aset Tetap		223,088,892,697	229,176,432,050
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22	-	-
Aset Lain-Lain	C.23	2,632,800,758	2,632,800,758
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(1,495,503,681)	(1,376,843,055)
Jumlah Aset Lainnya		1,137,297,077	1,255,957,703
JUMLAH ASET		224,593,608,463	230,880,627,303
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	119,500,000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	147,383,038	76,381,449
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.27	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.29	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		147,383,038	195,881,449
JUMLAH KEWAJIBAN		147,383,038	195,881,449
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.30	-	-
Ekuitas Dana Investasi	C.31	-	-
Ekuitas	C.32	224,446,225,425	230,684,745,854
JUMLAH EKUITAS DANA		224,446,225,425	230,684,745,854
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		224,593,608,463	230,880,627,303

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
LAPORAN OPERASIONAL TAHUNAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2,584,403,501	1,806,938,746
JUMLAH PENDAPATAN		2,584,403,501	1,806,938,746
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,576,108,898	6,319,479,449
Beban Persediaan	D.3	138,729,300	149,514,350
Beban Barang dan Jasa	D.4	4,429,073,593	3,995,182,102
Beban Pemeliharaan	D.5	924,679,145	891,740,182
Beban Perjalanan Dinas	D.6	706,876,076	247,659,450
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3,745,829,187	7,529,173,241
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		(3,943)
JUMLAH BEBAN		16,521,296,199	19,132,744,831
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(13,936,892,698)	(17,325,806,085)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non lancar	D.11	-	-
jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional lainnya		(171,353,735)	25,294,999
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(171,353,735)	25,294,999
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(14,109,790,433)	(17,300,511,086)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(14,108,246,433)	(17,300,511,086)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUNAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	230,684,745,854	237,518,812,641
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(14,109,790,433)	(17,300,511,086)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	E.3.	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		181,500,000	(1,297,613,450)
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.6	181,500,000	(14,226,344)
KOREKSI LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR	E.7	-	(1,283,387,106)
Jumlah Lain-Lain		181,500,000	(2,595,226,900)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		11,059,313,205	11,764,057,749
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.8.	(2,868,977,228)	(6,834,066,787)
EKUITAS AKHIR	E.9.	227,815,768,626	230,684,745,854

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Jaya PPDI No. 17, Brondong - Lamongan.

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan

kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam

pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TRI WULAN III Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Laporan Keuangan pada aplikasi SAKTI dihasilkan dari modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) yang sumber datanya berasal dari seluruh modul yang ada pada Aplikasi SAKTI mulai dari modul Anggaran, Komitmen, Bendahara, Pembayaran, Piutang, Persediaan, Aset Tetap dan modul GLP. Validitas dan kelengkapan data untuk Laporan Keuangan sangat tergantung pada validitas dan kelengkapan data masing-masing modul.

Aplikasi SAKTI Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TRI WULAN III Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- **Aset Lancar**

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp310.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 September 2022 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada semester I tahun 2022 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ada revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini karena adanya penambahan belanja pegawai untuk Tunjangan kinerja sesuai dengan program perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	1.200.001.000	1.200.001.000
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	1.200.001.000	1.200.001.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.850.461.000	6.850.461.000
Belanja Barang	6.440.605.000	6.440.605.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	1.170.473.000	1.170.473.000
Jumlah Belanja	14.461.539.000	14.461.539.000

**Realisasi
Pendapatan Rp.
2,672,654,519**

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 2,672,654,519 atau mencapai 223 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 1,200,001,000,- Pendapatan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	1,200,001,000	2,672,071,019	222.67
Pendapatan Lain-lain	-	583,500	-
Jumlah	1,200,001,000	2,672,654,519	222.72

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2022 Semester II mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

*Realisasi Belanja
Negara Rp.
13,738,382,885,-*

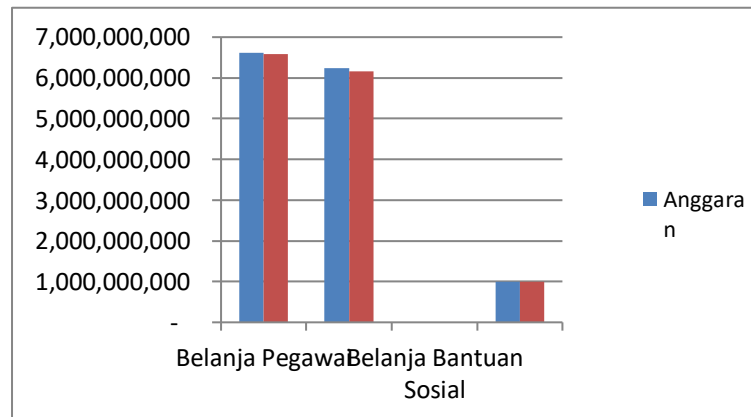
B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2022 adalah sebesar Rp. 13,738,382,885,- atau 99,21 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 13,789,631,000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6,606,823,000	6,576,045,799	99.53
Belanja Barang	6,235,360,000	6,151,189,925	98.65
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	1,005,718,000	1,004,732,000	99.90
Total Belanja Kotor	13,847,901,000	13,731,967,724	99.16
Pengembalian		6,415,161	-
Jumlah	13,847,901,000	13,738,382,885	99.21

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan.

Di tahun 2022 tidak terdapat adanya pekerjaan fisik hanya Belanja Pemeliharaan diikuti dengan peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategis pada TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6,576,045,799	6,319,274,449	4.06
Belanja Barang	6,151,189,925	5,282,129,331	16.45
Belanja Bantuan Sosial			-
Belanja Modal	1,004,732,000	1,612,737,600	(37.70)
Jumlah	13,731,967,724	13,214,141,380	3.92

Belanja Pegawai

Rp. 6,576,045,799,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 6,576,045,799,- dan Rp. 6.319.274.449,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami penurunan dalam realisasi belanja pegawai :

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6,542,731,960	6,321,242,314	3.50
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	39,729,000	24,998,000	58.93
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	6,582,460,960	6,346,240,314	3.72
Pengembalian Belanja Pegawai	6,415,161	3,470,531	84.85
Jumlah Belanja	6,588,876,121	6,349,710,845	3.77

Belanja Barang

Rp.

6.151.189.925,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 6,151,189,925,- dan Rp. 5.282.129.331,- Realisasi Belanja Barang T.A. 2022 mengalami kenaikan.

Hal ini antara lain disebabkan oleh realisasi di Semester I TA.2022 pada belanja barang operasional dan belanja jasa Tahun 2022.

Perbandingan Belanja Barang T.A. 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2,589,586,645	2,629,624,964	(1.52)
Belanja Barang Non Operasional	218,767,650	249,025,650	-
Belanja Jasa	1,549,717,709	1,118,864,985	38.51
Belanja Pemeliharaan	913,179,145	887,742,182	2.87
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	706,876,076	247,659,450	185.42
Belanja Barang Persediaan	173,062,700	149,212,100	15.98
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.		-	
Jumlah Belanja Kotor	6,151,189,925	5,282,129,331	16.45
Pengembalian Belanja	-		
Jumlah Belanja	6,151,189,925	5,282,129,331	16.45

Belanja Modal Rp. 1,004,732,000,- **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,004,732,000,- dan Rp. 806,992,000,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2022

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188,426,000	553,187,000	(65.94)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	692,409,000	251,911,000	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	123,897,000	807,639,600	0.00
Belanja Modal Lainnya	-	0	0.00
Belanja Modal BLU	-	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	1,004,732,000	1,612,737,600	-37.70
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1,004,732,000	1,612,737,600	-37.70

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi tersebut pada TA 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan tidak ada belanja modal tanah

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp. 188.426.000,- mengalami penurunan sebesar 133,43 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 495,923,000,-.

Realisasi Belanja Modal T.A. 2022 dan T.A. 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021
Sepeda	4,945,000	KOMPUTER	118,327,000
CCTV - Camera Control Television System	32,500,000	ALAT ANGKUTAN	106,770,000
Kasur/Spring Bed	3,650,000	ALAT BESAR	140,015,000
Lemari Es	11,800,000	ALAT STUDIO,	94,326,000
Karaoke	9,650,000	ALAT KANTOR &	36,485,000
Antena All Band	4,400,000		
Griffin Dinamic Trolley	42,660,000		
Lap Top	19,750,000		
Personal Komputer Lainnya	18,000,000		
Printer (Peralatan Personal Komputer)	9,371,000		
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10,000,000		
Laptop Case	21,700,000		
Jumlah Belanja Kotor	188,426,000		495,923,000
	-		-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal T.A. 2022 dan T.A. 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 692,409,000,- dan Rp. 196,111,000,-. Realisasi Belanja Modal T.A. 2021 mengalami kenaikan karena ada penambahan belanja modal gedung dan bangunan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	692,409,000	196,111,000	71.68
Jumlah Belanja Kotor	692,409,000	196,111,000	71.68
	-	-	-
Jumlah Belanja	692,409,000	196,111,000	71.68

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan T.A. 2022 dan T.A. 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.123,897,000,- dan Rp. Rp.807,639,600 Realisasi Belanja Modal T.A. 2021 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi T.A. 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal T.A. 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2022	T.A. 2021	Naik (Turun) %
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	123,897,000	8,076,396,000	-98.47
-	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0.00
-	-	-	-
Jumlah Belanja	123,897,000	8,076,396,000	-98.47

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya T.A 2022 dan T.A 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan

dibandingkan Realisasi T.A 2021.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp.0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial T.A. 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2022 .

Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial T.A 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
	0	0	#DIV/0!
	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.154,000,000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Kas di bendahara pengeluaran	-	119,000,000
	-	-
Jumlah	-	119,000,000

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 151.128.167,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 148.402.684,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	151.128.167,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	151.128.167,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	151.128.167,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	148.402.684,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	148.402.684,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	148.402.684,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 September 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2022	TH 2021
-	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp.0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Piutang
PNBP
Rp.2,599,822,
-

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.2,599.822,- dan Rp.0. Piutang PNBP merupakan pelayanan jasa Cold Storage hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya di tanggal 31 desember 2022 Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP

Uraian	TH 2022	TH 2021
Piutang PNBP	2,599,822	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	2,599,822	-

Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp.0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA. 2022 dan 2021

No	Nama	Tahun 2022	Tahun 2021
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		0	0
Jumlah		-	-

Bagian
Lancar TPA
Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 September 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0

dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TH 2019	TH 2018
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp 0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		5

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TH 2022	TH 2021
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.325,000,00,-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.325,000,000 dan Rp.325,000,000

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima T.A 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
PNBP penyewaan Kapal Keruk yang belum dibayark	325,600,000	-
	-	-
Jumlah	325,600,000	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima ini merupakan Piutang PNPB Penyewaan kapal keruk KM Pari 02 dengan PT Imelsenna Hovercloud Indonesia sesuai perjanjian Nomor:

B.484/PPNBT.A/KU.3421 IV 12021, tanggal 4 April 2020 tentang Perjanjian Sewa Kapal Keruk KM Pari 02 untuk Pekerjaan Pengerukan di Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman (Waduk Mrica) Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, yang belum dibayarkan bulan oktober, nopember desember tahun 2021 Sebesar Rp356.400.000,- .untuk penangihan sudah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, dengan nomor surat S-4361/WKN.07/KNL.02/2021 Tanggal 17 Nopember 2021.

Berkas kontrak dan kronologi terlampir.

Persediaan

Rp.36,563,400,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.38,978,400 ,- dan Rp.3,846,800,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TH 2022	TH 2021
Bahan Cetak Lainnya		4,605,250
Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	36,563,400	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	36,563,400	4,605,250

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan

TP/TGR

Rp.0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar

Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2022 dan 2021

No	Debitur	Tahun 2019	Tahun 2018
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		o	o
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TH 2022	TH 2021
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 September 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR

Rp.0

yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
TA 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Tanah

C.14 Tanah

Rp.,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong per 30 September 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 173,666,734,550,- dan Rp. 173,666,734,550,- . Tidak ada Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	173.666.734.550
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2021	173.666.734.550

Rincian saldo Tanah per 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No.	Kode Barang Merk Barang	Tgl. Perlh	Asal Perolehan	Rupiah Aset
2010103999 (Tanah)				
1	Tanah Reklamasi	13-12-2003		7.808.000.000
2	Tanah Reklamasi	13-12-2004		17.920.000.000
3	Tanah Reklamasi	12-12-2005		32.000.000.000
4	Tanah Reklamasi	31-12-2000		20.636.550.000
5	Tanah Reklamasi	02-07-2007		32.000.000.000
6	Tanah Reklamasi	31-07-2008		27.376.000.000
7	Tanah Reklamasi	29-05-2008		31.960.000.000
8	Reklamasi	22-12-2009		3.988.575.000
Jumlah				173.689.125.000
2010104001 (Tanah Bangunan Kantor Pemerintah)				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22-09-2000	BAST Eks Deptar	26.659.135.000
2	Koreksi nilai (reval)	31/12/2019		- 22.390.450
JUMLAH				173.666.734.550

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan asset tanah antara lain:

1. Progres sengketa tanah antara PPN Brondong dan PT. DOK dan Perkapalan Surabaya sudah sampai pada penyelesaian di tingkat Eselon I dimana DJPT sudah bersurat ke PT. DOK dan Perkapalan Surabaya dengan nomor surat : 17349/DJPT/PL.210.S1/XI/2021, Tgl. 21 Nopember 2021 tentang pelepasan hak tanah atas nama PT. DOK dan Perkapalan Surabaya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Telah dilakukan Audiensi dengan Bupati Lamongan dan DJPT pada hari jumat tanggal 9 September 2022 di kantor Pemerintahan Kabupaten Lamongan, berkas terlampir.

Peralatan dan Mesin
Rp.
32,570,884,05
4,-

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2022 dan 2021 adalah Rp. 32,570,894,054,- dan Rp. 33,770,392,055,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	33,770,392,055
Mutasi tambah:	887,286,000
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi masuk	0
Penyesuaian Jurnal Pasca Migrasi karena Perbedaan Mapping Kode Barang VS Akun terkait BMN	76,054,929
Hibah Barang	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	2,162,848,930
Reklasifikasi Keluar	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2022	32,570,884,054
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	(30,621,417,703)
Nilai Buku per 30 September 2022	1,949,466,351

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp.
36,034,540,99
5,-*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 36,034,540,995,- dan Rp. 35,514,794,924,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	35,514,794,924
Mutasi Tambah	
Pembelian	692,409,000
Reklasifikasi Masuk	150,258,400
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi Keluar	(246,866,400)
Penyesuaian jurnal pasca migrasi karena perbedaan mapping kode barang vs akun terkait BMN	(76,054,929)
Saldo per 31 Desember 2022	36,034,540,995
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(5,231,041,540)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	30,803,499,455

*Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp.
47,837,126,895,-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 47,837,126,895,- dan Rp. 47,713,229,895,- Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	47,713,229,895
Mutasi tambah:	
Pembelian	123,897,000
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Revaluasi Jalan, Jembatan dan Irigasi	
Saldo per 31 Desember 2022	47,837,126,895
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	(27,938,376,665)
Nilai Buku per 30 Juni 2020	19,898,750,230

Aset Tetap

Lainnya

Rp.96,182,000,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2021 dan 2020 adalah Rp. 96,182,000,- dan Rp. 96.182.000,-. Aset tetap tersebut berupa Laporan dan Maket/miniature/replika. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2021.

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp. 0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0 yang merupakan pembangunan Mess Operator, Pembutan Pagar BRC dan Rehabilitas Gedung Garasi Alat Berat dan Ruang Arsip

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap

Rp.

(63,790,835,908,-)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp(63,790,835,908,-). dan Rp. (61,584,901,374,-) . Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2022

adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	33,968,706,984	(30,621,417,703)	64,590,124,687
2	Gedung dan Bangunan	36,034,540,995	(5,231,041,540)	41,265,582,535
3	Jalan dan Jembatan irigasi	47,837,126,895	(27,938,376,665)	75,775,503,560
4	Aset Tetap Lainnya	96,182,000	0	96,182,000
Akumulasi Penyusutan		117,936,556,874	(63,790,835,908)	181,727,392,782

*Aset Tak
Berwujud
Rp.0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2022 dan 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 September 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2022	-
Nilai Buku per 30 September 2022	-

Mutasi tambah:-

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
	0
	0
Jumlah	0

Aset Lainnya C.22 Aset Lain-Lain

Rp.2,632,800,758,-

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2022 dan 2021 adalah Rp.,- dan Rp.2,632,800,758,- Rp2,632,800,758,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	2,632,800,758
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- Penghentian Aset	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	2,632,800,758
Akumulasi Penyusutan	(1,438,669,368)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1,194,131,390

Akumulasi C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp. 0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp. 0 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lain-lain	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Jumlah	0	0	0

*Uang Muka
dari KPPN
Rp. 0,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.119,500,000,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.147,383,0
38,-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.147,383,038,- dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Beban langganan listrik bulan desember 2022	98,488,293	
Beban langganan internet bulan desember 2022	3,853,804	
Beban langganan telepon bulan desember 2022	36,466	
Beban langganan air desember 2022	45,004,475	
Total	147,383,038	

*Pendapatan
yang
Ditangguhka
n
Rp0*

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp.0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNPB, pengembalian belanja, serta

pungutan/potong pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 30 September 2022.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

Uraian	Jumlah
Pendapatan PNB	-
PPH yang belum disetor	-
Total	-

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp,-*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
Pendapatan Jasa Lainnya	-
	-
	-
Total	-

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.
147,383,038*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp.147,383,038,- dan Rp. 76,381,449, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2022 dan TA 2021*

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Langganan Listrik	98,488,293	0
Beban Langganan Telephone	36,466	0
Beban Langganan Air	45,004,475	0
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,853,804	0
Jumlah	147,383,038	-

Ekuitas

*Rp.230,684,7
45,854,-*

C. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.230,684,745,854,- dan Rp. 237,518,812,641,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP*

*Rp.
2,672,654,519,-*

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.2,672,654,519- dan Rp.1,032,235,637,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahun 2022 dan 2021*

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	92,091,355	669,900	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,300,880		
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1,354,871,856	161,421,058	11.91
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1,221,806,928	717,877,819	58.76
Pendapatan Jasa lainnya		152,266,860	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lal	583500		
Jumlah	2,672,654,519	1,032,235,637	#DIV/0!

Beban

Pegawai Rp.

Rp.6,582,460,960,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.6,582,460,960- dan Rp. Rp. 6,319,479,449,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	6,576,108,898	6,319,479,449	96.10
pengembalian beban pegawai	6,415,000	3,470,531	54.10
Jumlah	6,582,523,898	6,322,949,980	96.06

Dengan Rincian sebagai berikut :

Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,406,105,940,
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	33,920
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	217,958,142
511122	Beban Tunj. Anak PNS	68,666,636
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	23,040,000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	199,559,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	8,057,056
511126	Beban Tunj. Beras PNS	168,883,440
511129	Beban Uang Makan PNS	407,743,000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	67,960,000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	68,797,300
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,280

511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,023,280
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	10,920,000
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,824,380
511628	Beban Uang Makan PPPK	15,376,000
512211	Beban Uang Lembur	39,729,000
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,781,259,374
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PPPK	92,523,212
	Total	6,582,460,960

*Beban
Persediaan
Rp.
138,729,300,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 138,729,300,- dan Rp. 99,490,250,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	110,164,300	71,330,750	65
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan		407,000	-
Beban Persediaan bahan baku	28,565,000	27,752,500	97
Beban Persediaan Lainnya		0	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		0	-
Jumlah	138,729,300	99,490,250	162

Beban Barang dan Jasa
D.4 Beban Barang dan Jasa
Rp.4,425,473,593,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.4,425,473,593,- dan Rp.2,489,554,520,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2,363,112,645.	1,674,279,034	70.85
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	766,000.	1,206,500	0.00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	141,088,000.	95,532,000	67.71
Beban Barang Operasional Lainnya	84,620,000.	1,720,000	2.03
Beban Bahan	167,304,650.	44,768,300	26.76
Beban Honor Output Kegiatan	18,410,000.	11,490,000	62.41
Beban Barang Non Operasional Lainnya	33,053,000.	15,800,000	47.80
Beban Langganan Listrik	1,110,166,122.	461,724,404	41.59
Beban Langganan Telepon	581,159.	276,776	47.62
Beban Langganan Air	233,443,222.	72,129,376	30.90
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	76,911,795.	47,965,130	62.36
Beban Jasa Lainnya	193,932,000.	49,269,000	25.41
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,085,000.	13,394,000	0.00
	4,425,473,593	2,489,554,520	485

Beban Pemeliharaan
D.5 Beban Pemeliharaan
Rp.913,179,145,-

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.913,179,145,- dan Rp. 415,074,301,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	324,557,500	156,999,000	48.37
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	440,978,645	239,157,301	54.23
Beban Pemeliharaan jaringan	147,643,000	18,511,000	-
beban persediaan bahan untuk pemeliharaan		407,000	#DIV/0!
Jumlah	913,179,145	415,074,301	45.45

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.706,876,076,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.706,876,076,- dan Rp. 126,822,650,- Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	516,058,769	38,654,050	7.49
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,350,000	9,150,000	47.29
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	31,500,000	13,500,000	42.86
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	139,967,307	65,518,600	46.81
Jumlah	706,876,076	126,822,650	144.44

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2021.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
	0	-	-
	0	-	-
Jumlah	0	-	-

*Beban
Bantuan
Sosial Rp.0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
Jumlah	0	-	-

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp.
3,737,830,437,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.3,737,830,437 dan Rp. 3,794,692,712,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2022	TH 2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	716.342.164	829.293.871
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	380.049.001	430.426.051
Beban Penyusutan Jalan dan jembatan	2.101.778.982	2.092.053.982
Beban Penyusutan Irigasi	294.874.100	259.338.370
Beban Penyusutan Jaringan	182.959.877	182.959.877
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak digunakan	61.826.313	622.561
Jumlah Penyusutan	3.737.830.437	3.794.694.712
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.737.830.437	3.794.694.712

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Surplus dari Kegiatan Non Operasional (171,353,735),-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Surplus/defisit pelepasan aset non lancar	(171,937,235)	0	-
surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya	583,500	13,295,000	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(171,353,735)	13,295,000	-

Pos Luar Biasa Rp

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering t

erjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
	0	0	-
	0	0	-
	0	0	-
Jumlah	0	0	-

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp.

230,684,745,85

4,-

Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.230,684,745,854 dan Rp. 237,518,812,641,-

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp.

(14,108,246,43

3)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2020 adalah sebesar Rp. (14,108,246,433) dan Rp. (10,462,822,364) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan

Rp. 0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Rp
0*

E.4 Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi pencatatan aset tetap untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Koreksi
Koreksi Nilai Saldo Awal	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Beban Rp0*

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas beban untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Pendapatan
Rp. 0*

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi tambah atas Pendapatan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Hibah
Masuk/
Keluar Rp.0*

E.7 Koreksi Hibah Masuk/Keluar

Koreksi Atas Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Hibah Masuk/Keluar untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Hibah Masuk/Keluar

Jenis Koreksi	Koreksi
	-
Jumlah	-

*Ekuitas Akhir
Rp.
224,593,608,4
63,-*

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. dan Rp. 224,593,608,463

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.




F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada tahun 2022 Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ibrahim, A.Pi, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Rizal Arifendi,A.Md, S.TP
Pejabat Penandatangan / Penguji SPM	: Adityo Nugroho, SE
Bendahara Pengeluaran	: R. Hendrawan Virandika S.Pi
Bendahara Penerimaan	: Ida Fitriah Agustini,S.Pi
Operator SAI (SAIBA)	: Siti Muthia Ulfa, A.Md
Operator SIMAK BMN	: Jovan Pramaditya Candra, S.AP

Kementerian Kelautan dan Perikanan Inspektorat Jenderal		Disusun oleh/Tanggal	Anantya / Januari 2023
		Direviu oleh/Tanggal	Rian Samara / Januari 2023
		Disetujui oleh/Tanggal	Bambang K / Januari 2023
UAPA	<input type="checkbox"/>	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
UAPPA-E1	<input type="checkbox"/>	Ditjen Perikanan Tangkap	
UAPPA-W	<input type="checkbox"/>	Provinsi Jawa Timur	
UAKPA	<input type="checkbox"/>	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (427692)	
Uraian Catatan Hasil Reviu			Indeks KKR
Penyelenggaraan Akuntansi :			
1. Validitas data laporan keuangan pada MON SAKTI per tanggal 25 Januari 2022 diketahui bahwa Satker telah menuntaskan proses migrasi saldo awal, dengan rincian : <ol style="list-style-type: none"> Pada Monitoring, tidak terdapat selisih Reklas Keluar/Masuk Pada Monitoring Rekonsiliasi tidak terdapat TDK Rupiah dan TDK COA. Pada Daftar rincian, tidak terdapat Saldo akun tidak normal, Aset Belum Diregister, Pagu Minus, Pengembalian Melebihi Realisasi, Akun Pajak, 2. BA Stock Opname persediaan telah dibuat			
Penyajian LK :			
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :			
a. Pendapatan Target pendapatan sebesar Rp1.200.001.000 dengan realisasi sebesar Rp2.672.654.519,00 atau 223% b. Belanja Pagu sebesar Rp13.847.901.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.731.967.724,00 atau 99% dari pagu anggaran			
Tidak ada koreksi			
B. Laporan Operasional :			
Surplus/Defisit LO senilai (Rp14.108.246.433,00)			
Terdapat koreksi Tidak Terdapat Koreksi			
C. Laporan Perubahan Ekuitas :			
Ekuitas awal senilai Rp230.684.745.854,00 Kenaikan/Penurunan Ekuitas senilai Rp(6.238.520.429,00) Ekuitas akhir senilai Rp224.446.225.425,00 telah sesuai dengan ekuitas akhir di Neraca			
Terdapat koreksi Tidak Terdapat Koreksi			
D. Neraca :			
1. Jumlah Aset senilai Rp224.593.608.463,00 terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Aset Lancar senilai Rp367.418.689,00 Aset Tetap senilai Rp223.088.892.697,00 Aset Lainnya senilai Rp1.137.297.077,00 2. Jumlah Kewajiban senilai Rp147.383.038, berupa:			

<p>a. Utang kepada Pihak Ketiga senilai Rp147.383.038,00. b. Ekuitas senilai Rp224.446.225.425,00 telah sesuai</p> <p>Tidak terdapat koreksi</p>		
<p>E. Catatan atas Keuangan (CaLK) dan CLBMN</p>		
<p>1. Penjelasan rincian PYMHD senilai Rp326.204.065 berupa rincian pembentuk PYMHD dan data dari aplikasi Teman SPB 2. Penjelasan terkait penyesuaian aset gedung bangunan menjadi Alsin senilai Rp76.054.929,00</p>		
<p>Usulan Koreksi</p>		
<p>Melengkapi penjelasan Piutang dalam CALK dan upaya penyelesaian selanjutnya</p>		
<p>Tindak Lanjut</p>		
<p>Surabaya, 25 Januari 2023</p>		
<p>Tim Reviu,</p>  <p>Rian Samara</p>	<p>Petugas SAIBA,</p>  <p>Agus Ribowo</p>	<p>Petugas SIMAK BMN,</p>  <p>Jovan Pramaditya Candra</p>